

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK
BERBAHAYA (STUDI PADA KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA)**

**Oleh
Trianda Lestari
NIM. 2105040019**

ABSTRAK

Kosmetik berbahaya masih beredar di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, meskipun produk-produk tersebut telah diumumkan oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Kecamatan Lingga Utara belum berjalan optimal. BPOM bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Lingga melakukan pengawasan melalui upaya preventif dan represif, namun pelaksanaannya masih bergantung pada aduan masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak-hak konsumen, namun implementasinya belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kosmetik ilegal, kurangnya pengawasan, dan lemahnya pemahaman hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan peran instansi terkait dalam pengawasan serta edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf f UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Pembinaan dan pendidikan ini penting untuk memperkuat perlindungan konsumen agar terhindar dari kosmetik berbahaya, sehingga konsumen mampu melakukan pengaduan ke instansi terkait guna memaksimalkan upaya preventif dan represif yang tersedia.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya, Konsumen, Pelaku Usaha, Pengawasan.

**CONSUMER PROTECTION AGAINST DANGEROUS COSMETICS (STUDY
IN NORTH LINGGA DISTRICT LINGGA REGENCY)**

By
Trianda Lestari
NIM. 2105040019

ABSTRACT

Hazardous cosmetics are still circulating in Lingga Utara District, Lingga Regency, even though these products have been publicly listed by the Directorate of Standardization of Traditional Medicines, Health Supplements, and Cosmetics. This study aims to identify the forms of consumer protection and the legal remedies available in response to the circulation of hazardous cosmetics. The method used in this research is empirical, with a statutory and socio-legal approach. The findings indicate that consumer protection in Lingga Utara District is not yet optimal. The National Agency of Drug and Food Control (BPOM), in collaboration with the Office of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of Lingga Regency, conducts supervision through preventive and repressive efforts. However, these efforts largely depend on public complaints before any action can be taken. Normatively, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection guarantees the rights of consumers. However, its implementation remains suboptimal due to low public awareness of the dangers of illegal cosmetics, insufficient supervision, and a lack of legal knowledge. In conclusion, there is a need to strengthen the role of relevant institutions in supervision and to enhance legal education for the public. This aligns with Article 4 point (f) of the Consumer Protection Law, which states that consumers have the right to receive guidance and education. Such guidance and education are crucial to strengthening consumer protection, helping consumers avoid hazardous cosmetics, and enabling them to report to relevant authorities to optimize both preventive and repressive measures.

Keywords: *Consumer Protection, Harmful Cosmetics, Consumer, Business Actor, Supervision.*